

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu organisasi baik itu pemerintah atau swasta tentu terdapat beberapa orang atau sekelompok orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Suatu organisasi diselenggarakan karena adanya suatu kepentingan atau suatu tujuan yang hendak dicapai. Agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah faktor sumber daya manusia.

Dikatakan masalah tentang manusia berarti akan bicara tentang betapa pentingnya faktor sumber daya manusia, disamping sumber daya yang lain seperti sumber daya alam, modal, peralatan, teknologi dan lain-lain bagi tercapainya tujuan organisasi. Begitu menentukan peranan yang dimainkan sumber daya manusia bagi hidup matinya organisasi. Tidak disangsikan lagi bahwa peranan sumber daya manusia dalam organisasi memegang peranan yang menentukan, oleh karena hidup matinya organisasi semata-mata tergantung pada sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia di dalam organisasi itu bermoral baik, dinamis dan bersatu maka organisasi akan dapat hidup dan berkembang. Memang sulit untuk disangkal bahwa lengkapnya modal, sempurnanya peralatan serta kemajuan teknologi tidaklah akan berarti bagi tercapainya tujuan organisasi tanpa didukung kualitas sumber daya manusia.

Pada kenyataannya dalam proses berjalannya sebuah organisasi sering ditemui adanya ketidak harmonisan dalam pencapaian tujuan organisasi. Kondisi

yang lamban mulai menjadi suatu masalah yang semakin mencuat ke permukaan. Menjadi sebuah opsi ke arah manakah sebuah organisasi akan terus berlayar. Maju atau mundur menjadi sebuah pilihan yang harus dikelola secara bijak karena pada dasarnya organisasi merupakan sebuah wadah dimana terdapat sistem-sistem yang selalu berkaitan dengan lingkungan multidimensional.

Oleh karena itu, banyaknya komponen yang berpengaruh pada organisasi sering kali menimbulkan permasalahan yang mengancam kelangsungan organisasi. Untuk dapat bertahan menghadapi segala permasalahan, tantangan, ancaman, maupun gangguan dan hambatan organisasi harus mampu mengarahkan setiap anggotanya agar dapat beradaptasi dengan baik dan bahkan agar mampu mengakomodasi segala dampak positif maupun negatif yang timbul dengan melakukan berbagai perubahan dan pengembangan ke arah positif.

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan tidak simpang siur. Pola koordinasi menjadi hal yang vital bagi semua pemimpin di berbagai tingkat untuk mencapai tujuan tim. Jika pola koordinasi baik maka tujuan tim akan mempunyai lebih besar kemungkinan untuk tercapai jika dibandingkan dengan pola koordinasi yang buruk. Terkadang pasti membingungkan, kenapa koordinasi yang sudah direncanakan tidak teraplikasikan dengan baik, ataupun ketika rapat berjalan lancar namun pada saat eksekusinya sering berjalan kurang baik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Karo adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 pada Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya salah satunya menyelenggarakan fungsi kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Kordinasi yang terjalin pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo bersifat horizontal, yang artinya bahwa pada organisasi ini terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, hal ini menyebabkan koordinasi menjadi tidak terarah dan teratur pada bagian-bagian tertentu. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo masih adanya koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Koordinasi tersebut belum terlaksana seperti diharapkan karena adanya pandangan yang berbeda dari masing-masing pegawai.

Menurut pengamatan penulis bahwa koordinasi kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dinilai kurang baik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Penyebab Koordinasi Belum Terealisasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

No.	Penyebab Koordinasi Belum Terealisasi
1	Kurangnya kesadaran tiap pegawai terhadap pentingnya kesatuan dalam bekerja dan berkoordinasi pada bagian-bagian yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
2	Komunikasi dan hubungan kerja yang kurang harmonis membuat terjadinya ketidakpercayaan antar sesama pegawai
3	Terjadinya penundaan kerja sehingga terjadi penumpukan kerja.
4	Tanggung jawab setiap pegawai yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi dalam mengerjakan suatu tugas.

Sumber : Observasi Penulis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, 2019

Koordinasi yang kurang berjalan dengan baik akan mempengaruhi kualitas kerja pegawai. Koordinasi mempunyai hubungan erat dengan masalah kinerja dan produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha-usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja disuatu organisasi merupakan hal penting.

Implikasi dari kurang baiknya koordinasi tersebut berakibat pada perilaku dan kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Hal ini ditandai dengan kurang disiplinnya pegawai dalam mentaati peraturan dan melakukan pekerjaannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo juga masih banyak yang perlu dibenahi, seperti pembangunan tempat-tempat umum, seperti taman, jalan, dan bangunan-bangunan lainnya.

Berdasarkan observasi penulis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

penulis menemukan beberapa masalah mengenai kinerja pegawai, seperti kualitas kerja pegawai masih rendah terlihat dari penataan arsip pegawai yang tidak tersimpan dilemari arsip dan hanya bertumpuk di atas meja kerja, kurangnya inisiatif yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan untuk penunjang fasilitas bagi pegawai dalam menjalankan tugas, dan ketepatan waktu yang dimiliki oleh pegawai belum maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan aspek-aspek kinerja. Standar kinerja pegawai Kantor Pertanahan dalam pengerjaan surat-surat yang berkaitan dengan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Standar Kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

No	Jenis Kinerja	Standar (Waktu)	Realisasi (Waktu)
1	Pengecekan Sertipikat	7 jam kerja	1-2 hari kerja
2	Penghapusan hak tanggungan atau roya	5 hari kerja	7-10 hari kerja
3	Pendaftaran hak tanggungan	7 hari kerja	14 hari kerja
4	Peralihan hak-jual beli	5 hari kerja	7-14 hari kerja
5	Cek plotting	2 hari kerja	5 hari kerja
6	Pemecahan/Pemisahan	15 hari kerja	20-30 hari kerja

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dan Observasi Penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa standar kinerja dilihat berdasarkan waktunya dengan realisasinya memiliki rentang waktu yang cukup jauh berbeda. Standar kinerja di atas merupakan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk pengerjaan berkas atau surat-surat pada Kantor Pertanahan dan telah ditetapkan dalam bentuk instrumen kebijakan di bidang pertanahan. Namun, standar kinerja tersebut tidak terealisasi sebagaimana semestinya, sehingga menyebabkan adanya penumpukan berkas dan terjadinya penumpukan pekerjaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Hal tersebut

terjadi karena pada saat ini pegawai lebih fokus mengerjakan pendaftaran tanah milik masyarakat yang belum didaftarkan di suatu wilayah yang disebut juga dengan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yang merupakan program pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan program tersebut, pegawai menjadi tidak teratur dalam mengerjakan tugas yang lainnya, disebabkan karena program tersebut harus selesai tepat pada waktunya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Masalah kinerja yang tidak teralisasi dengan baik dipengaruhi oleh koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Jika koordinasi terealisasi dengan baik maka pegawai akan bekerja dengan baik juga. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pegawai akan tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya.

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dapat dilihat dari perilaku pegawainya. Suatu struktur pemerintah, birokrasi dipergunakan untuk menyebut badan-badan pemerintah baik departemen maupun non departemen yang berfungsi sebagai suatu alat yang menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab melalui suatu proses administrasi demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari adanya kinerja pegawai, dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Koordinasi Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Koordinasi kerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo kurang baik, hal ini ditandai dengan kesadaran pegawai dalam bekerja masih rendah, komunikasi dan hubungan kerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang kurang harmonis, terjadinya penundaan dan penumpukan kerja, dan terjadinya perbedaan pendapat sesama pegawai karena tanggung jawab setiap pegawai yang berbeda.

1.3 Batasan Masalah

Di dalam melakukan penelitian, perlu dibuat batasan masalah sehingga pelaksanaan penelitian dapat difokuskan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, penulis membatasi permasalahan penelitian pada koordinasi kerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah kegiatan untuk mempersempit permasalahan penelitian, sehingga dapat membantu penulis di dalam pelaksanaan penelitian untuk memecahkan dan menjawab masalah yang akan diteliti.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimanakah koordinasi kerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo?”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi kerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan, wawasan penulis, dan juga pengalaman penulis tentang pelaksanaan dan penyusunan penelitian ilmiah khususnya tentang analisis koordinasi kerja pegawai.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah mengenai koordinasi kerja pegawai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan wawasan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai analisis koordinasi kerja pegawai.